

Tanggung jawab tersebut ANTAM tuangkan dalam rencana strategis Perusahaan, yaitu Dokumen Rencana Pascatambang (RPT). Dokumen RPT juga menjadi panduan bagi ANTAM untuk memulihkan fungsi alam dan fungsi sosial di setiap wilayah operasional setelah kegiatan tambang berakhir. ANTAM memiliki kewajiban untuk mereklamasi lahan sesuai peruntukannya, sehingga lahan bekas tambang dapat berfungsi dan bermanfaat kembali.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, ANTAM menyadari kewajiban untuk merehabilitasi lahan sesuai peruntukannya, sesuai dengan dokumen Rencana Pascatambang (RPT). Program Pascatambang tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab Perusahaan untuk keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, melainkan juga diharapkan memberikan dampak ekonomi dan manfaat positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional jika sewaktu-waktu ANTAM habis masa IUP.

Pada proses perencanaannya, ANTAM bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat setempat. Sementara dalam pelaksanaannya, ANTAM memberikan perhatian khusus pada potensi sumber ekonomi di tiap daerah yang bisa dikembangkan. Beberapa di antaranya seperti di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah agar bisa dikembangkan hingga mencapai hasil maksimal.

HAK ASASI MANUSIA

Dalam menjalankan setiap aktivitas operasional, ANTAM selalu menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut Perusahaan terapkan sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi-konvensi utama Lembaga Buruh Internasional (ILO), serta Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penghormatan terhadap hak asasi juga merupakan bagian dari budaya "AKHLAK" ANTAM.

Sebagai anggota MIND ID, Perusahaan juga patuh pada Kebijakan Pelaksana tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang di dalamnya mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, pelestarian budaya setempat, dan perlindungan hak ulayat. Di samping itu, Grup MIND ID juga memiliki Kebijakan Pelaksana mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang juga berfokus pada pengembangan dan pelibatan masyarakat adat.

ANTAM expresses this responsibility in the Company's strategic plan, namely the Post-Mining Plan (RPT) Document. The RPT document is also a guide for ANTAM to restore natural and social functions in each operational area after mining activities end. ANTAM has an obligation to reclaim land according to its designation, so that ex-mining land can function and be useful again.

As a form of responsibility towards the environment, ANTAM is aware of its obligation to rehabilitate land according to its intended use, in accordance with the Post-Mining Plan (RPT) document. The Post-mining Program is not only a form of the Company's responsibility for sustainability and environmental preservation but is also expected to provide economic impacts and positive benefits for communities in the vicinity of its operational areas if ANTAM's IUP expires at any time.

In the planning process, ANTAM synergizes with Local Government, Non-Governmental Organizations (NGOs), Educational Institutions and other stakeholders, including local communities. While in its implementation, ANTAM pays special attention to the potential economic resources in each region that can be developed. Some of them are in the fields of agriculture, fisheries, livestock, and processing of products to increase added value so that they can be developed to achieve maximum results.

HUMAN RIGHTS

In carrying out every operational activity, ANTAM always respects the principles of human rights. This is implemented by the Company in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the main Conventions of the International Labor Organization (ILO), and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Respect for human rights is also part of ANTAM's "AKHLAK" culture.

As a member of MIND ID, the Company also complies with the Implementing Policy on Human Rights (HAM), which includes protection of the rights of indigenous communities, preservation of local culture, and protection of customary rights. In addition, the MIND ID Group also has an Implementing Policy regarding Community Development and Empowerment, which also focuses on the development and involvement of indigenous communities.



PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, ANTAM berhubungan dengan masyarakat sekitar tambang, termasuk masyarakat adat. Penting bagi ANTAM untuk menjunjung tinggi hak-hak mereka melalui praktik usaha yang adil dan transparan, serta membangun hubungan yang konstruktif termasuk mendorong upaya-upaya penyelesaian *win-win solution*.

ANTAM memahami, bahwa dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional Perusahaan, keberadaan masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ANTAM senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi perlindungan atas hak-hak masyarakat setempat, termasuk hak-hak ulayat masyarakat adat yang berada di lima area operasional Perusahaan, yaitu UBP Nikel Kolaka, UBP Nikel Maluku Utara, UBP Emas di Jawa Barat, UBP Bauksit di Kalimantan Barat dan UBP Nikel Konawe Utara.

Dalam implementasinya, ANTAM secara rutin berupaya untuk menjalin komunikasi dua arah kepada seluruh pemangku kepentingan guna memahami dan menangkap aspirasi yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya lokal. Sehingga, di setiap lokasi penambangan, ANTAM mampu mengutamakan hak-hak adat masyarakat setempat, terlebih pada wilayah yang bersinggungan langsung dengan wilayah adat masyarakat setempat. Meskipun secara geografis wilayah operasional Perusahaan berdekatan dengan suku terasing seperti Dayak di Kalimantan Barat dan Togutil di Maluku Utara, namun ANTAM tidak melanggar hak-hak masyarakat adat setempat.

Jika terjadi pembukaan wilayah operasional yang bersinggungan dengan wilayah adat istiadat maupun masyarakat sekitar, ANTAM selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan yang baik. Salah satunya, Perusahaan akan melakukan relokasi pemukiman warga yang berada di wilayah operasional tambang dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Melalui pendampingan, khususnya pada program yang berkaitan dengan mata pencaharian warga setempat secara turun-temurun (*local livelihoods*), ANTAM juga mendorong terciptanya kemandirian wilayah. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat insiden yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan adat mereka. **[GRI 2-23][GRI 411-1]**

PROTECTION OF INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS

In carrying out operational activities, ANTAM liaises with communities around the mine, including indigenous communities. It is important for ANTAM to uphold their rights through fair and transparent business practices, as well as building constructive relationships, including encouraging win-win solutions.

ANTAM understands that in carrying out all of the Company's operational activities, the presence of the community is an integral part. Therefore, ANTAM always respects and upholds the protection of the rights of local communities, including the customary rights of indigenous communities located in five operational areas of the Company, namely Kolaka Nickel Mining Business Unit, North Maluku Nickel Mining Business Unit, Gold Mining Business Unit in West Java, Bauxite Mining Business Unit in West Kalimantan, and North Konawe Nickel Mining Business Unit.

In practice, ANTAM continuously strives to establish two-way communication with all stakeholders to understand and capture aspirations related to the local social, economic, and cultural aspects. Thus, in every mining location, ANTAM is able to prioritize the customary rights of local communities, especially in areas that directly intersect with the customary territories of local communities. Although the Company's operational areas are geographically close to alienated tribes, such as Dayak in West Kalimantan and Togutil in North Maluku, ANTAM does not violate the rights of local indigenous peoples.

If there is an opening of operational areas that intersect with traditional areas or surrounding communities, ANTAM always prioritizes the principle of caution through an appropriate approach. One of which, the Company will relocate residential areas in the mining operational area by providing the infrastructure needed by these communities. Through assistance, especially in programs related to the livelihoods of residents from generation to generation (*local livelihoods*), ANTAM also encourages the creation of regional self-reliance. Throughout 2023, there were no incidents related to violations of their customary regulations. **[GRI 2-23][GRI 411-1]**

GRIEVANCE MECHANISM DAN PENANGANAN KELUHAN TERKAIT HAM

ANTAM selalu memastikan tidak ada praktik diskriminasi dalam segala kegiatan usaha di seluruh wilayah operasional. Setiap pelanggaran yang terkait Hak Asasi Manusia (HAM) akan Perusahaan tindaklanjuti sesuai mekanisme pengaduan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pengaduan ditangani dengan itikad baik, melalui proses yang transparan dan tidak memihak, serta tetap dapat diterima dari aspek budayanya. Keluhan yang disampaikan dikelola melalui proses yang transparan, mudah diterima oleh semua segmen masyarakat yang terdampak serta pemangku kepentingan lainnya, dan dilakukan tanpa biaya.

Sepanjang tahun 2023, berdasarkan data pencatatan Perusahaan, tidak terdapat keluhan terkait HAM. Hal tersebut menunjukkan komitmen nyata ANTAM dalam meningkatkan kegiatan operasional berdasarkan praktik-praktik pertambangan terbaik.

KETERLIBATAN DAN REMEDIASI TERHADAP DAMPAK AKTIVITASNYA TERHADAP HAK ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA [GRI 14.12]

Dalam upaya memastikan keterlibatan yang bermakna dengan para pemangku kepentingan yang terdampak oleh aktivitas Perusahaan, ANTAM mengadopsi pendekatan yang inklusif. Kami berkomitmen untuk menjalin dialog yang berarti dengan masyarakat lokal, dengan memperhatikan keamanan dan kesetaraan partisipasi gender. Kami membuka platform dialog yang transparan untuk mendukung partisipasi yang aman dan adil dari semua pihak terdampak.

Selain itu, ANTAM memiliki kebijakan dan komitmen dalam memberikan remediasi kepada masyarakat lokal atau individu yang mengalami pemukiman kembali paksa. Proses ini melibatkan penilaian yang teliti untuk menetapkan kompensasi atas kerugian aset atau bantuan lainnya guna meningkatkan atau memulihkan standar hidup atau mata pencaharian mereka. Kami berupaya agar proses ini dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal.

GRIEVANCE MECHANISM AND COMPLAINTS HANDLING RELATED TO HUMAN RIGHTS

ANTAM always ensures the absence of discriminatory practices in all business activities in all operational areas. Any violation related to human rights will be followed up by the Company in accordance with the complaint mechanism. This mechanism aims to ensure that complaints are handled in good faith, through a transparent and impartial process, and remain culturally acceptable. Grievances are managed through a process that is transparent, accessible to all segments of the affected communities and other stakeholders and conducted at no cost.

Throughout 2023, based on the Company's recording data, there were no complaints related to human rights. This demonstrates ANTAM's real commitment to improving operational activities based on best mining practices.

ENGAGEMENT AND REMEDIATION TO THE IMPACT OF ACTIVITIES ON LAND AND RESOURCE RIGHTS [GRI 14.12]

In an effort to ensure meaningful engagement with stakeholders affected by the Company's activities, ANTAM adopts an inclusive approach. We are committed to establishing meaningful dialogue with local communities, with attention to safety and equal gender participation. We open a transparent dialogue platform to support safe and fair participation of all affected parties.

In addition, ANTAM has a clear policy and commitment in providing remediation to local communities or individuals experiencing forced resettlement. This process involves a rigorous assessment to determine compensation for asset losses or other assistance to improve or restore their standard of living or livelihood. We strive to ensure that this process is carried out in a fair, transparent, and sustainable manner, taking into account the needs and aspirations of local communities.